

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kegagalan *United Nations Mission for Justice Support in Haiti* (MINUJUSTH) dalam mewujudkan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Haiti pada periode 2017–2019. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan misi ini disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, politik, sosial, dan institusional yang saling berkaitan, serta diperkuat oleh ketidakseimbangan dalam elemen-elemen rezim internasional sebagaimana dijelaskan oleh teori Stephen D. Krasner.

Secara empiris, pelaksanaan misi MINUJUSTH menghadapi berbagai hambatan di tingkat domestik. Pertama, krisis legitimasi publik muncul karena trauma mendalam masyarakat terhadap misi sebelumnya, MINUSTAH, yang meninggalkan catatan negatif seperti epidemi kolera dan kasus pelanggaran HAM (United Nations, 2016). Kondisi ini membuat masyarakat Haiti meragukan komitmen moral PBB. Kedua, keterbatasan dukungan politik dan pendanaan internasional menyebabkan misi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan mandatnya. Laporan PBB mencatat bahwa MINUJUSTH hanya memiliki 351 staf sipil dan kurang dari 1.000 personel kepolisian internasional, jumlah yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah tugas (United Nations, 2018). Ketiga, lemahnya kapasitas institusional pemerintah Haiti, termasuk Haitian National Police (HNP) dan sistem peradilan nasional, menyebabkan program reformasi hukum tidak berjalan optimal. Keempat, situasi politik yang tidak stabil, disertai gelombang protes dan krisis kepemimpinan, turut memperburuk efektivitas misi (United Nations, 2019).

Melalui perspektif teori rezim internasional Krasner, faktor-faktor empiris tersebut dapat dijelaskan melalui ketidakseimbangan lima parameter utama: *power*, *interest*, *diffuse norms*, *usage & custom*, dan *knowledge*. Dalam aspek *power*, berkurangnya dukungan dari negara hegemonik seperti Amerika Serikat dan Prancis

membuat PBB kehilangan kekuatan politik dan sumber daya yang diperlukan untuk menopang operasional misi. Pada dimensi *interest*, perbedaan kepentingan antara PBB dan elite politik Haiti menimbulkan resistensi terhadap reformasi yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan domestik.

Selanjutnya, pada aspek *diffuse norms*, nilai-nilai universal PBB seperti *rule of law* dan perlindungan HAM gagal diinternalisasi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga internasional. Dalam konteks *usage & custom*, pengalaman negatif masyarakat terhadap misi sebelumnya menciptakan *collective memory* yang sulit dihapus, sehingga setiap intervensi PBB dipandang dengan skeptisisme tinggi. Terakhir, dalam aspek *knowledge*, lemahnya sistem pemantauan (*monitoring and evaluation*) serta ketiadaan data dasar membuat implementasi kebijakan tidak terukur dan tidak kontekstual dengan kondisi sosial-politik Haiti (United Nations, 2019).

Dengan demikian, kegagalan MINUJUSTH mencerminkan keterbatasan fundamental dalam efektivitas rezim internasional PBB. Rezim ini memiliki prinsip, norma, aturan, dan prosedur formal yang mapan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuasaan global, dukungan politik, penerimaan sosial, serta kapasitas teknis di tingkat lokal. Kasus Haiti menunjukkan bahwa tanpa dukungan hegemonik yang konsisten, keselarasan kepentingan antara aktor internasional dan domestik, serta internalisasi norma global ke dalam konteks lokal, misi perdamaian cenderung tidak berkelanjutan.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa teori rezim internasional Krasner mampu menjelaskan kegagalan misi perdamaian PBB bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi sebagai refleksi dari ketidakseimbangan struktural dalam sistem internasional. Dengan kata lain, kegagalan MINUJUSTH di Haiti merupakan cerminan dari keterbatasan rezim internasional dalam menavigasi hubungan antara legitimasi global dan kedaulatan domestik, antara idealisme perdamaian dan realitas politik negara yang rapuh.